BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia, dengan ±18.110 pulau yang dimilikinya dengan begitu banyak pula pedesaan yang tersebar di beberapa pulau tersebut. Begitu banyaknya pedesaan yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia pemerintah harus mencari jalan untuk meningkatkan beberapa desa yang belum berkembang dengan cara membuat satu kebijakan untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat di daerah, khususnya di daerah pedesaan, melalui program yang dinamakan PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri), merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah pedesaan.

PNPM Mandiri Pedesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak tahun 1998. PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan secara resmi oleh Presiden RI pada 30 April 2007 di kota Palu, Sulawesi Tengah. Program Pemberdayaan Masyarakat ini dapat dilakukan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air, dalam pelaksanaannya program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di pedesaan. Program ini menyediakan fasilitas pemberdayaan masyarakat / kelembagaan local seperti: pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Besaran dana BLM yang dialokasikan sebesar Rp 750 juta sampai Rp 3 milliar per kecamatan, tergantung dari pada jumlah penduduk tersebut.

PNPM Mandiri Pedesaan seluruh anggota masyarakatnya diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan dan pelestariannya. Pelaksanaan PNPM

Mandiri Pedesaan berada di bawah naungan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiyaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lebih memfokuskan pada dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang - undang tentang Pemerintahan Daerah telah dibuka saluran baru (kran) bagi Pemerintah Propinsi dan Kabupaten untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat setempat, untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pada prinsip acuan dasar dari otonomi daerah telah diwujudkan melalui undang-undang nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, serta Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000, Peraturan Pemerintahan Nomor 84 Tahun 2000, selanjutnya Peraturan Pemerintahan Nomor 104, 105, 106, 107, 108, 109, dan 110 Tahun 2000 dan ketentuan lainnya yang relevan.

Inti konsep pelaksanaan Otonomi Daerah, adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian tuntutan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata dengan penerapan otonomi daerah luas dan kelangsungan pelayanan umum tidak diabaikan, salam serta memelihara kesinambungan fiskal secara nasional.

Otonomi Daerah ini merupakan fenomena politis yang sangat dibutuhkan dalam era globalisasi (penjagadan, penduniaan) dan demokrasi, apa lagi jika dikaitkan dengan tantangan masa depan memasuki era perdagangan bebas antara lain ditandai dengan tumbuhnya berbagai bentuk kerja sama regional *(sijori),* perubahan pola atau sistem informasi global, melalui otonomi diharapkan Daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan Pemerintah Pusat diharapkan tidak terlalu mengatur daerah. Untuk mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara

propesional dan berkeadilan, jauh dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta adanya perimbangan antara keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah.

Permasalahan PNPM ini lebih menggunakan model kebijakan procedural karena kebijakan prosuderal ini lebih menampilkan hubungan yang dinamis diantara variable-variabel yang diyakini menjadi cirri suatu masalah kebijakan dengan membuat sebuah prediksi-prediksi dan melahirkan beberapa solusi yang optimal.pembuatan kebijakan tersebut dapat diartikan orang yang memperoleh pengakuan sebagai pemegang hak dan kewajiban untuk mengembangkan kebijakan itu sendiri. Kebijakan itu dimaksud untuk memberikan pendekatan cara mengatasi suatu permasalahan dimasyarakat, kebijakan itu sendiri lebih tertuju pada solusi untuk situasi-situasi tertentu. Tujuan analisis kebijakan ;membuat keputusan dengan cara memilih alternative yang paling baik dari berbagai alternative yang ada. Dari definisi tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa fungsi analisis kebijakan ditujukan untuk mendifinisikan masalah yang dihadapi pembuat kebijakan dan menempatkannya pada proposi yang tepat, merumuskan tujuan pokok yang akan dicapai, serta pada saat yang berusaha sedemikian rupa guna menyajikan alternatif-alternatif kebijakan baru dengan tindakan-tindakan yang efektif, efisiensi, dan logis.

PNPM Mandiri Pedesaan juga memiliki beberapa prinsip lainnya, yakni:

1. Bertumpu pada pembangunan manusia.
2. Setiap kegiatan diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia seutuhnya dan prinsip demokratis.
3. Setiap pengambilan keputusan pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.

Prinsip-prinsip dalam PNPM Mandiri Pedesaan juga dikenal dengan sebutan SiKOMPAK dilanjut dengan tagline: SiKOMPAK, kunci kemandirian Desa Kami. Prinsip tersebut selain memiliki filosofi yang mencerminkan prinsip-prinsip program dalam artiharfiah, juga ingin mengajak masyarakat

untuk kompak (bersatu padu) dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah pedesaan.Memulai SiKOMPAK ini diharapkan kemandirian desa dapat terwujud dan berkembang.

Berdasarkan latar belakangdi atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang hasilnya disusun dalam sebuah laporan dan akan mencoba mencari pemecahan masalah dengan mengajukan judul Laporan KKL sebagai berikut : **"Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Program PNPM Mandiri (Studi KhususTentang Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) di Desa Cibening Kabupaten Purwakarta".**

1.2 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.2.1 Manfaat bagi pribadi

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis memberikan manfaat bagi diri sebagai berikut :

1. Supaya mahasiswa akan memperoleh pengalaman belajar yang berharga, melalui keterlibatannya dalam masyarakat secara langsung.
2. Mengetahui pengertian dan penghayatan terhadap kemanfaatan ilmu, teknologi dan seni yang dipelajari bagi pelaksanaan pembangunan.
3. Memperdalam penghayatan dan pengertian mahasiswa terhadap kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.
4. Memberikan pengalaman bekerja dalam melakukan penalahan perumusan dan memecahkan masalah secara langsung, akan lebih menumbuhkan sifat profesionalisme dalam diri mahasiswa untuk melaksanakan program-program dan proyek pembangunan yang berada dibawah tanggung jawabnya.

1.2.2 Manfaat Teoritis

Melalui Laporan KKL ini dapat menambah pengetahuan tentang teori dan konsep baru dalam ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan judul yang diteliti sehingga menambah wawasan dan pengetahuan.

1.2.3 Manfaat Praktis

Melalui Laporan KKL ini dapat mengurangi Tingkat Kemiskinan di Desa Cibening Kabupaten Purwakarta dengan Melalui Progam PNPM Mandiri diharapkan masyarakat akan mendapat pelayanan yang mudah dan terbaik.

1.3 Metode KKL

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam praktek kuliah kerja lapangan ini adalah metode deskritif analisis, yaitu metode penelitian berlaku yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada waktu penelitian dilakukan, dengan cara mencari, mengumpulkan dan menyusun data secara sistematis. Kemudian data tersebut dianalisis untuk mendapatkan pemecahan masalah, hal ini sesuai dengan pendapat Surakhmad yang mengemukakan ciri-ciri metode deskritif analisis adalah sebagai berikut ;

a. Memusatkan diri pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang yang aktual,
b. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, dan kemudian dianalisis.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat penulis kemukakan, bahwa dengan menggunakan metode penelitian yang dilakukan oleh penulis tertuju pada masa sekarang yang aktual. Selain itu pula dengan metode penelitian tersebut penulis dapat mengumpulkan, menguraikan, dan menggambarkan data-data yang penulis temui selama penelitian, yang selanjutnya data tersebut penulis olah dan analisis menjadi suatu

kesimpulan untuk mendapat jawaban dari permasalahan yang dihadapi dalam penelitian tersebut.

1.3.1 Teknik pengumpulan data

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut ;

a. Studi kepustakaan

Dengan cara mempelajari badan-badan bacaan berupa buku-Buku, dan bahan-bahan bacaan lainnya secara teoritis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Observasi

Yaitu mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung dan pencatatan peristiwa, kejadian serta kegiatan yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti,

c. Wawancara

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui pertanyaan pertanyaan yang telah ditentukan oleh informan atau nara sumber yang berkaitan dengan masalah yang telah peneliti ambil.

1.4 Lokasi KKL

Kuliah kerja lapangan bertempat di Jl.Raya Cibening No.2002 Purwakarta Desa Cibening Kabupaten Purwakarta.

1.4.1 Pelaksanaan KKL

Untuk waktu pelaksanaan kuliah kerja lapangan (KKL) untuk saat ini belum bisa ditentukan oleh pihak kampus.

Tabel 1.1

Jadwal Kuliah Kerja Lapangan

Kegiatan	**Tahun 2012/2013**							
	Mei	**Juni**	**Juli**	**Agsts**	**Sept**	**Okt**	**Nov**	**Feb**
Obserpasi awal KKL	■							
Pengajuan Judul KKL	■	■						
Bimbingan Usulan KKL		■	■					
Penyusunan Usulan KKL		■	■					
Pelaksanaan KKL			■	■				
Penyusunan Laporan KKL					■	■	■	
Bimbingan Laporan KKL					■	■	■	
Pengumpulan Laporan KKL							■	
Seminar Lokakarya								■